## IMPLEMENTASI KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT PASAL 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

( Studi Kasus Badan Permusyawaratan Desa Remban, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara)

#### **SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum Pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung



**Dadang Fernando** 

1183030010

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2022/1444

#### LEMBAR JUDUL

# IMPLEMENTASI KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT PASAL 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

( Studi Kasus Badan Permusyawaratan Desa Remban, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara)

### **SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum Pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung



**Dadang Fernando** 

1183030010

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2022/1444